

KATA PENGANTAR

Faktor-faktor demografis merupakan bagian penting dalam strategi pencalonan kepala daerah dan memobilisasi dukungan politik untuk memenangi kompetisi politik di tingkat lokal. Menurut Kuskridho, isu yang berkaitan dengan status migran, agama, kesukuan, dan kedaerahan adalah isu yang kerap dieksplorasi dan dieksploitasi. Isu-isu primordial lebih banyak tampil di gelanggang pilkada ketimbang isu-isu kebijakan. Dalam jangka pendek, pemetaan politik konvensional yang berbasis pada klasifikasi demografi akan terus berjalan. Namun, untuk jangka panjang, pemetaan dan analisis *post-demographic* akan menjadi saingan dalam bisnis jasa pemetaan politik di pilkada.

Masih tentang isu pilkada, Aulia Hadi dan Riwanto Tirtosudarmo meneliti interaksi antara migrasi, etnisitas, dan politik lokal di DKI Jakarta dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 2000-an. Fokusnya terletak pada perkembangan terakhir, yaitu fenomena 'Ahok', julukan Basuki Tjahaja Purnama, seorang Cina-Kristen dari kota kecil Belitung, yang menjadi Gubernur Jakarta dengan popularitasnya yang melesat. Mereka berpendapat bahwa perkembangan terkini menunjukkan kondisi politik Jakarta yang lebih bersifat kewargaan daripada politik etnik. Kondisi Jakarta sebagai sebuah kota migran yang terus berkembang mengubah identitas budaya yang sempit dan partai politik yang konvensional menjadi politik kewargaan yang semakin aktif dengan meluasnya penggunaan media sosial.

Selain isu pilkada seperti di atas, Muhadjir tertarik menyoroti isu yang menyoroti pembangunan daerah supaya lebih partisipatif sebagai jaminan bahwa hak warga negara sepenuhnya. Dalam hal ini, akuntabilitas sosial adalah kunci yang harus diperbaiki dari sisi penawaran dan permintaan secara bersamaan. Dari sisi penawaran, perlu adanya reformasi tata pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan daerah, perencanaan daerah, penganggaran daerah, dan penyediaan layanan publik daerah. Sementara itu, dari sisi permintaan, ada kebutuhan untuk memberdayakan warga setempat sehingga mereka terlibat dalam lima aspek pembangunan daerah: perumusan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengembangan berbasis masyarakat, dan penyediaan layanan publik.

Lebih lanjut, Lely Indrawati, Dwi Hapsari, dan Olwin Nainggolan menyatakan bahwa TFR (Total Fertility Rate) merupakan salah satu indikator ukuran kemajuan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dalam satu negara. Oleh karenanya, target RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan angka kelahiran. Hasil perhitungan Lely, dkk. menggunakan Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa TFR di Indonesia lebih tinggi (3,2) dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan sumber data yang lain. Jika dilihat dari pola ASFR (Age Specific Fertility Rate), angka kelahiran tertinggi tercatat pada usia 20-24 kemudian usia 15-19. Oleh karena itu, fokus program keluarga berencana harus diberikan pada kelompok umur tersebut, salah satunya adalah dengan peningkatan usia kawin pertama.

Artikel terakhir dari Heryanah meneliti kondisi ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dengan data Susenas dan menggunakan regresi order logistik. Heryanah juga mencoba mencari faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Jawa Barat dengan sepuluh variabel independen (*dummy* perkotaan, *dummy* jenis kelamin, *dummy* status perkawinan, umur kepala rumah tangga, banyaknya jumlah anggota rumah tangga, rata-rata lama sekolah dari kepala rumah tangga, *dummy* kerja atau tidak, pengeluaran per kapita rumah tangga, *dummy* kelayakan sanitasi, dan *dummy* kondisi kumuh). Kesepuluh variabel independen tersebut secara statistik signifikan memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Jawa Barat.